



Issue 28/07/2009

Peluang & Tantangan

Pengembangan Bisnis Budidaya Ikan Kerapu

Oleh: Zulkifli,

Sekretaris Jendral Asosiasi Saudagar Ikan Aceh (ASIA)

Salah satu sektor rill yang mulai mejadi diskursus public's di meja makan, restoran, warung-warung kopi, aula hotel, seminar dan forum-forum komunitas intelegensia plus media massa Aceh saat ini adalah usaha kelautan & perikanan. Mengapa? Sulit memberikan jawaban pasti sebab sifat dari masalah ekonomi memang tidak pernah constant akan tetapi setidaknya-tidaknya perkembangan ini menjelaskan bahwa usaha kelautan mulai dilirik orang. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran dari berbagai pihak yang terus menerus bekerja mempromosikan dunia usaha laut, sebagai anak nelayan terimakasih saya untuk semua solidaritas anda.

Sebagai wilayah maritime, Aceh memiliki garis pantai yang panjang dengan kandungan ikan potensial. Survey membuktikan bahwa di wilayah pantai Utara, terdapat banyak berbagai jenis ikan tongkol, salem, dencis, setuhuk, yellowfin tuna, skipjack, bigeyes, kembung, pari bintang, tenggiri, boneto, dan berbagai jenis perikanan tangkap lainnya. Sementara di wilayah pantai barat, para pelaut paling sering menangkap dan membawa pulang biota laut seperti Lobster, Udang galah serta berbagai jenis berbagai jenis ikan karang.

Jenis-jenis ikan diatas, merupakan komoditi kelautan yang memiliki nilai tukar tinggi di berbagai level pasar, baik pasar lokal maupun pasar international. Hanya saja, monopoli alat-alat produksi dan jaringan pasar ikan oleh kaum kapital telah menjatuhkan nilai tukar commodity tersebut sehingga akhirnya produksi yang dilakukan nelayan tidak lebih hanya untuk memperkaya pemilik modal belaka. Keadaan tentu akan berbeda "jaringan setan" ini bisa dipatahkan.

Sepanjang pengamatan saya, di Aceh hanya ada dua katagori bisnis kelautan; **pertama**, perikanan tangkap dan **kedua** kelompok perikanan darat atau disebut juga dengan perikanan budidaya. Meski beda, kedua jenis bisnis ini telah menjadi mata pencaharian pokok lebih dari 21 % penduduk pesisir Aceh. Berdasarkan data yang ada, pekerjaan ini sudah menjadi tradisi

yang terus dipertahankan dari generasi ke generasi sejak 500 tahun yang lalu sampai sekarang.

Dibanding dengan masa lalu, bisnis kelautan di zaman sekarang sebenarnya mengalami kemunduran, dimana para pelaku hanya bicara menangkap, mengolah dan menjual ikan saja. Selebihnya ya bikin pabrik es, cool storage, jual beli BBM dan atau buka usaha TOSERBA Nelayan. Artinya, cakrawala fikir orang-orang sekarang tentang bisnis kelautan mengalami kemunduran. Padahal, menilik sejarah masa lampau, bisnis kelautan Aceh jauh lebih maju dari kondisi sekarang, dimana pekerjaan di lautan bukan hanya sekedar tangkap, olah dan jual ikan atau bisnis turunan diatas tetapi termasuk didalamnya bisnis perhubungan. Bukankah, aceh merupakan central keberangkatan jamaah haji dan pelabuhan dagang yang menembus dunia. Artinya, dimasa lampau orang-orang Aceh telah cerdas dalam mengelola potensi kelauatannya sampai bisa menembus pintu-pintu dunia. Dengan kata lain, para pelaut Aceh tidak menjadikan laut semata-mata sebagai tempat menangkap ikan tetapi juga sudah cakap mengembangkan jasa pelayaran dan perdagangan hasil-hasil bumi ke psaar-pasar dunia.

Permasalahan

Pasca proses recontruksi & rehabilitasi yang dikelola oleh BRR NAD & NIAS, media-media melaporkan bahwa telah terjadi pembengkakan angka pengangguran sehubungan dengan berakhirnya aktifitas pembangunan. Laporan ini secara implisit menjelaskan bahwa selama proses rekonstruksi terjadi ada banyak pekerjaan sementara yang tercipta sehingga permintaan terhadap tenaga kerja pada waktu itu benar-benar sangat tinggi. Namun karena sifatnya yang terbatas, para pekerja terpaksa kembali kerumah masing-masing setelah kontrak diputuskan dan status pengangguran kembali disandang oleh ratusan ribu warga Aceh.

Bagaimana mengatasinya

Ada beberapa langkah yang sangat mungkin ditempuh pemerintah Aceh dalam rangka mengatasi problematika ekonomi diatas. Cara pertama adalah dengan menggalakkan pendirian industri-industri pengolahan hasil pertanian atau perikanan yang berbasis padat karya atau dalam bahasa sederhana dapat melibatkan lebih banyak tenaga manusia daripada mesin. Cara kedua adalah dengan men-support para pengangguran itu agar berkuasa untuk membuka/menjalankan usaha-usaha produktif tertentu sehingga tidak hanya mendatangkan income untuk dirinya tetapi juga bisa melibatkan sekurang-kurangnya 3-5 (lima) orang tenaga manusia. Dengan cara-cara ini, jumlah pengangguran otomatis berangsur-ansunr dapat ditekan dan kemudian terbangunlah suatu tatanan ekonomi jangka panjang yang benar-benar kuat.

Bisnis perikanan darat sebagai salah satu re-solusinya.

Bukan hanya perikanan tangkap, para penduduk di wilayah pantai Aceh kecenderungan cukup cerdas dalam melihat peluang usaha daratan yang masih “sodaraan” dengan apa yang dikerjakan nelayan di lautan. Sepanjang pengalaman dan amatan saya, ada 4 jenis budidaya perikanan darat yang hari ini paling populer dikalangan penduduk pesisir, yaitu; bisnis budidaya ikan bandeng, ikan kerapu tongkol, udang windu dan kepiting cangkang lunak dan atau cangkang keras. Terlepas dari menguntungkan atau tidak, yang pasti bisnis ini membentang sepanjang wilayah pantai utara dan pantai barat Aceh dengan keterlibatan manusia dalam jumlah banyak.

Diantara 4 (empat) jenis bisnis diatas, hanya satu usaha yang benar-benar paling favorite yaitu bisnis budidaya ikan kerapu. Ada berbagai cara yang dilakukan penduduk untuk bisa cepat menuai hasil, dimana sebagian petani hanya membesarkan benih lalu menjualnya pada usia muda sementara sebagian lainnya melanjutkan pemeliharaan sampai tubuh sang ikan mencapai bobot 500 gram-1 kg per ekornya. Dalam satu pertemuan dengan petani kerapu, diperoleh informasi bahwa ditingkat local harga ikan ini bisa mencapai 50.000 rupiah per kg, sementara dipasar luar negri meski tidak ada informasi kongkrit harga ikan dipastikan lebih mahal dari harga beli konsumen local. Terlepas dari besar kecil nilai tukarnya, yang jelas usaha ini sudah menampakkan sisi benefit yang signifikan serta efektif menyedot tenaga kerja dan menjadikan lebih banyak manusia Aceh bisa hidup mandiri melalui pemanfaatan kekayaan alam yang tersedia disekeliling mereka. Dan buat saya, ini merupakan sebuah filosofi ekonomi yang indah dan cukup cerdas untuk diteruskan ke generasi selanjutnya. Terang saja, sumber-sumber daya alam tersebut sebenarnya tersedia untuk mereka, hanya saja kadang kala kemampuan mereka untuk mengolahnya adalah lemah dan bahkan tidak kuasa sama sekali.

Lalu bagaimana memperkuat akses mereka

Baru-baru ini, banyak media melaporkan bahwa telah terjadi kredit macet dari Program Pemakmu Nanggro yang dikucurkan pemerintah Irwandi-Nazar. Laporan ini beberapa kali dilansir oleh Serambi Indonesia, Harian Aceh dan beberapa tabloid local lainnya. Secara tegas, disebutkan pula nyaris 90 % dana program tersebut macet total alias tidak dikembalikan sebagaimana perjanjian awal sehingga terkesan betapa si peminjam tidak konsisten dengan janjinya. Dan baru-baru ini, media kembali melaporkan bahwa telah diluncurkan program kredit pemberdayaan pengusaha aceh yang terkena dampak konflik & tsunami yang disingkat dengan KPPA, dimana pola yang dipakai harus prinsip agunan. Artinya, si peminjam harus mampu menyediakan anggunan jika ingin meminjam dana tersebut. Penelusuran yang saya lakukan, sipeminjam diharuskan mendapatkan rekomendasi KADIN Aceh terlebih dahulu dan setelah itu rekomendasi gubernur dikeluarkan dan selanjutnya BPD akan menganalisis kelayakan usulan pinjaman si peminjam dan setelah proses itu semua selesai, baru dana itu dikucurkan. Demikianlah, sampai sekarang tidak terdengar lagi apa kabar program KPPA itu, sudahkah dikucurkan atau masih mengendap di rekening BPD entahlah....saya tidak punya jawaban.

Yang menarik dari kedua program diatas adalah kedua-duanya bertujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh agar bisa berkembang kearah yang lebih baik. Akan tetapi, sungguh disayangkan ketika sipemakmu Nangro justru mati dalam usia muda sementara si KPPA nyaris tak terdengar kabar beritanya. Terlepas dari berbagai bias, yang jelas kedua program diatas merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mencapai tujuan ekonominya. Dan disini, saya akan coba berikan sedikit komentar terutama dengan sistem dan orientasi dasar program KPPA dan hubungannya dengan bisnis perikanan darat terutama budidaya ikan kerapu.

Sebagaimana yang saya jelaskan diatas, bahwa KPPA program investasi & permodalan yang berdasarkan sistim collateral atau dalam istilah umum disebut juga agunan, dimana setiap pemohon diwajibkan dikenakan bunga pinjaman sebesar 8 % per tahunnya dengan nilai anggunan harus 80 % dari total pinjaman yang diminta. katakan saja anda akan meminjam 100 juta rupiah selama 2 tahun. jika dikalikan 8 % maka bunga yang harus anda bayar adalah 8 juta pertahun jika pinjaman anda adalah 2 tahun maka total bunga yang harus anda bayar adalah 16 juta rupiah sehingga akumulasi utang anda sama dengan 116 juta rupiah. Dan anda akan mendapatkan dana ini apabila anggunan yang anda tawarkan adalah senilai 80 % dari 100 juta. Itu akan sama dengan 80 juta rupiah. Jadi asumsinya jika anda punya uang sebanyak 80 juta, tentu saja anda tidak butuh utang mereka sebab anda sudah cukup modal bagi anda untuk jalankan rencana bisnis anda. Kontradiksi dan hubungannya dengan bisnis budidaya kerapu adalah, KPPA tidak cocok untuk petani (tidak bertambak) atau nelayan (tidak berkapal) karena kedua kelompok masyarakat diatas jelas tidak kuasa menyediakan collateral atau anggunan sebagaimana yang diminta KPPA. Dengan demikian, hilanglah peluang mereka untuk mengakses sumber dana ini. dan ini berarti, tidak ada jalan bagi mereka untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka.

Membaca peraturannya, KPPA adalah suatu rencana pemberdayaan yang distorsi dengan kepentingan kelas pemodal. Secara kasar saya mau bilang bahwa program KPPA itu tidak lebih dari usaha orang senang mencari untung pada orang susah. Lebih extrim lagi, orang-orang yang tak punya angguna dilarang mengambil uang ini karena dikawatirkan tidak akan bisa ditarik kembali. Jadi pertanyaannya, dimanakan posisi pemerintah dalam menjawab tuntutan modal bagi orang-orang kecil diatas dan apakah negri ini hanya miliki orang-orang ber anggunan. Pertanyaan ini saya rasa cukup relevan untuk diajukan mengingat di hari ini paling banyak kasus kemacetan usaha di Indonesia dan aceh pasa khususnya terjadi gara-gara tangan-tangan negara tidak bekerja untuk rakyatnya.

Beranjak dari realitas sosial diatas, lewat tulisan ini saya mengusulkan agar pemerintah Aceh sepatutnya juga memberikan layanan pinjaman modal untuk petani tambak, nelayan sekaligus memberikan pembinaan khusus untuk para pemuda yang berstatus pengangguran supaya usaha mereka bisa berkembang disatu sisi dan adanya bisnis produktif bagi kelompok Non-Job disisi yang lain. Patut saya tegaskan pula, bahwa sebaiknya pemerintah tidak menjadikan kasus pemakmu naggro sebagai justifikasi untuk mengayomi kepentingan masyarakat diatas kecuali melakukan evaluasi atas kegagalan masa lalu dan merumuskan formusali baru dalam bidang permodalan dan investasi dimasa depan. Lebih lanjut, kegagalan Pemakmu Nanggro, haruslah

dilihat sebagai sebuah tolak ukur tentang secerdas apakah pemerintah Aceh sekarang ketika berusaha mewujudkan visi misi pemerintahnya. Bagaimana pak Wandu dan Pak Nazar, saya tunggu aksi-aksi anda selanjutnya, dan mudah-mudahan pada kesempatan kedua nanti akan ada hasil yang lebih baik. ***)